

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

Badrulzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994).

Bogdan, Michael, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Bandung: Nusamedia, 2010).

Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, diterjemahkan oleh Arief Sidharta, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996).

Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kesatu*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016).

Deliarnoor, Nandang Alamsah, *Sistem Hukum Indonesia (Edisi 2)*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019).

Dja'is, Mochamad, RMJ. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR Edisi Revisi*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010).

Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

Donnelly, Jack, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (Ithaca and London, Cornell University Press, 2003).

- Gautama, Sudargo, *Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Alumni, 1978).
- Handoyono, B. Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara Indonesia “Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009).
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Hartini, Rahayu, *Hukum Kepailitan*, (Malang: UMM Press, 2007).
- Hartono, Siti Soemarti, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang FH UGM, 1981).
- Herimanto, Winarno, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, (Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2012).
- Hoff, Jerry, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2000).
- Imron, Ali, dan Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, (Pamulang: UNPAM PRESS, 2019).
- Ishaq, H., *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Kantaprawira, Rusadi, *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*, (Bandung: Sinar Baru, 1988).
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).
- Klomp, R.J.Q., & C. Mak, *Burgelijk Wetboek*, (Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2012).

- Kusmaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung, Penerbit Alumni, 2003).
- Locke John, *Two Treatise of Civil Government*, (London: The Aldine Press, 1960).
- Madnasir, *Pengantar Bisnis dan Manajemen*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2007).
- Mangun, Ulang, Syprrianus, dan Nevev Varida, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Hukum Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)*, (Jakarta: CV. Pang Linge, 2017).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010).
- Meliala, Djaja S., *Penuntun Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut KUHPerdara*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008).
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993).
- Nating, Imran, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: PT. Pusaka Utama Grafiti, 2002).
- Nugroho, Susanti Adi, *Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Putra, Ida Bagus Wyasa, *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016).
- Qamar, Nurul, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010).
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986).

- Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).
- Saija, Ronald, dan Roger F.X., *Buku Ajar Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Deppublish, 2016).
- Sastrawidjaja, Man. S., 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: PT. Alumni, 2006).
- Situmorang, Victor, dan Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Grafiti., 2002).
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Subekti, Raden dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992).
- Subhan, Hadi, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2010).

Supomo, R., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1972).

Supramono, Gatot, *Hukum Orang Asing Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010).

Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997).

Suteki, dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Press, 2018).

B. Makalah, Artikel, dan/atau Jurnal

Abbot, Kenneth W. et al, *The Concept of Legalization*, (International Organization: Cambridge University Press, Volume 54, Issue 3, 2000).

Ayu, Ni Made, dan Anak Agung Ketut, *Syarat Sahnya Surat Kuasa Substitusi yang Dibuat di Luar Negeri dalam Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Jurnal Kertha Wicara: Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 7, Nomor 3, 2018).

Atmoko, Dwi, *Pelaksanaan Perjanjian Serta Perlindungan Hukum Praktek Bisnis Waralaba di Indonesia*, (Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 13, Nomor 1, 2019).

- Basuki, Zulfa Djoko, *Kemungkinan Indonesia Mengaksesi The Hague Convention Abolishing The Requirement of Legalization for Foreign Public Documents*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013).
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, (Jurnal Gema Keadilan, Volume 7, Edisi I, 2020).
- Chuari, Meiliana, Pieter E. Latumeten, dan Widodo S., *Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Kuasa (Warga Negara Asing) Terhadap Pembatalan Secara Sepihak Oleh Penerima Kuasa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 996/Pdt.6/2017/PN.Dps)*, (Notary UI, Volume 1, Nomor 4, 2019).
- Frija, Rahman, Ety Susilowati, dan Hendro Saptono, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Separatis Terhadap Pelaksanaan Hak Eksekutorial Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas*, (Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, 2016).
- Hamdi, Sulaiman, dan Teuku Yudi Afrizal, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelunasan Piutang dari Harta Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 511/K/Pdt.Sus-Pailit/2014)*, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Unimal, Volume 1, Nomor 1, 2020).
- Heaton, J. B., *Solvency Tests*, (The Business Lawyer, Volume 62, Number 3, 2007).

- Hukumonline, *Perjanjian Timbal Balik atau Perjanjian Sepihak*, (Hukumonline.com, 2008).
- Isra, Saldi, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, 2014).
- Juanda, H. Enju, S.H., M.H., *Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia*, (Galuh Justisi, Volume 4, Nomor 1, 2016).
- Kurniawan, Nyoman Samuel, *Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif Dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan)*, (Jurnal Magister Udayana, Volume 3, Nomor 1, 2014).
- Latumeten, Pieter E., *Reposisi Pemberian Kuasa Dalam Konsep “Volmacht dan Lastgeving” Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*, (Jurnal Hukum & Pembangunan, Nomor 1, 2017).
- Marjo, *Mengkritisi Eksepsi Tidak Berkuasanya Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri*, (Garba Rujukan Digital, Volume 39, Nomor 2, 2010).
- Moreau, F.J., *Who Are Creditors in a Reorganization Proceeding?*, (Washington University Law Review, Volume, 26, Issue 1, 1940).
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010).

- Mulyanti, Susi et al, *Analisis Yuridis Kedudukan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, (USU Law Journal, Volume 2, Nomor 2, 2013).
- Pambudi, Ari Rio, Etty Susilowati, dan Hendro Saptono, *Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Pada Kepailitan Perusahaan Efek (Studi Kasus Kepailitan PT. AAA Sekuritas)*, (Diponegoro Law Jurnal, Volume 5, Nomor 3, 2016).
- Pramono, Dedy, *Kekuatan Pembuktian yang Dibuak oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Lex Jurnalica, Volume 12, Nomor 3, 2015).
- Satria, Rio, *Syarat Formil Surat Kuasa Khusus Dalam Praktek Pengadilan*, (Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2015).
- Shadiqin, Moch. Thariq, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Asas Kepastian dan Keadilan*, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Administrative Law & Governance, Volume 2, Issue 3, 2019).
- Silitonga, Rikki Josua, *Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Pemohon Pailit Bank Setelah Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan*, (Premise Law Jurnal, Volume 21, 2016).
- Simanjuntak, Enrico, *Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, 2019).
- Sulaiman, Alfin, *Hubungan OJK Terhadap Prosedur Kepailitan Perbankan dan Industri Keuangan*, (Hukumonline.com, 2014).

- Syahrin, M. Alvi, *Actio Pauliana: Konsep Hukum dan Problematikanya*, (Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 1, 2017).
- Tendean, Brando Yohanes, *Akibat Hukum Tentang Debitur yang Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, (Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi: Lex Privatum, Volume 5, Nomor 3, 2017).
- Tobing, Letezia, *Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, (Hukumonline.com, 2012).
- Yustina, Endang Wahyati et al, *Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan Hak Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa*, (Jurnal Kedokteran Indonesia, Volume 6, Nomor 1, 2020).

C. Skripsi/Tesis/Disertasi

- Danisworo, Ibnu, *Analisa Perbandingan Hukum Kepailitan Indonesia Dengan Hukum Kepailitan di Amerika Serikat*, (Skripsi Fakultas Universitas Indonesia, 2013).
- Fitfulia, Hilda, *Perlindungan Nasabah Asuransi Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi Pasca Lahirnya UU OJK*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2014).
- Erma Defiana Putriyanti dan Tata Wijayanta, *Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Asuransi*, (Yogyakarta: Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2010).

Irwan, *Pembatalan Pailit oleh Mahkamah Agung dari Kasus PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 834 K/Pdt.Sus/2009)*, (Depok: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Indonesia, 2010).

Syahputra, Isnandar, *Kewenangan Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Asuransi*, (Universitas Diponegoro: Program Magister Ilmu Hukum (Hukum Ekonomi dan Bisnis), 2009).

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Title 11 of the United States Code as the United States Bankruptcy Code.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Luar Negeri.

Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Document (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik asing).

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat Pada Dokumen di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) No. 3038 K/Pdt/1981.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang
Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang
Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994.

Putusan Pengadilan Niaga No. 18/Pailit/ 2008/PN-Niaga.Sby.

E. Sumber Lainnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia.